

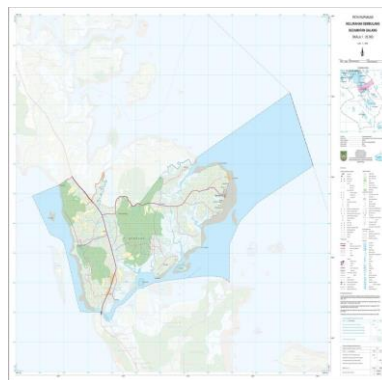
BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Konteks Pembangunan Rempang *Eco-City*

Rempang *Eco-City* merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis di Kota Batam yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Status tersebut menempatkan kawasan ini dalam prioritas percepatan pembangunan berbasis investasi dan industri. Pengembangan kawasan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing wilayah. Berdasarkan konteks ini, kawasan transmigrasi menjadi bagian penting dari transformasi ruang dan struktur sosial masyarakat setempat. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran mengenai lokasi kawasan penelitian, berikut ditampilkan peta wilayah Kelurahan Sembulang yang merupakan bagian dari kawasan pengembangan Rempang *Eco-City*.

**Gambar 2. 1 Peta Batas Wilayah
Kelurahan Sembulang**



Sumber: Kelurahan Sembulang (2025)

Penetapan proyek dalam kerangka PSN membawa konsekuensi pada pola perencanaan yang terintegrasi dan terpusat. Percepatan pembangunan menjadi

orientasi utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Skema pengembangan disusun melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Kondisi ini memengaruhi ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi kebijakan.

PSN di Kota Batam, kewenangan pengelolaan kawasan berada pada BP Batam yang memiliki otoritas khusus dalam pengembangan wilayah. Kelembagaan ini berperan sebagai pelaksana utama kebijakan pengembangan Rempang *Eco-City*. Posisi tersebut memperlihatkan adanya struktur kewenangan yang kuat dalam proses pengambilan keputusan. Struktur ini turut menentukan bagaimana aspirasi masyarakat dapat disalurkan dan dipertimbangkan.

Pengembangan Rempang *Eco-City* dirancang sebagai kawasan industri dan permukiman terpadu. Transformasi ruang ini berdampak langsung pada wilayah kampung tua dan kawasan transmigrasi. Sebagian masyarakat harus menghadapi proses relokasi sebagai konsekuensi pembangunan. Situasi tersebut menimbulkan dinamika sosial yang memengaruhi tingkat penerimaan dan keterlibatan masyarakat.

Sebagian besar masyarakat di kawasan terdampak menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan tangkap dan aktivitas pesisir. Ketergantungan terhadap ruang laut menjadikan relokasi sebagai isu sensitif dan kompleks. Perubahan lokasi hunian berpotensi mengubah pola produksi dan jaringan sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam membentuk respons dan partisipasi warga terhadap kebijakan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah melakukan sosialisasi dan komunikasi kebijakan kepada masyarakat terdampak. Proses tersebut umumnya dilakukan melalui pertemuan formal dan penyampaian informasi oleh aparat dan tokoh masyarakat. Namun, ruang dialog substantif mengenai alternatif kebijakan relatif terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cenderung berada pada tahap pemberian informasi dan konsultasi.

Karakter perencanaan yang bersifat *top-down* memperlihatkan dominasi aktor pemerintah dalam menentukan arah pembangunan. Masyarakat lebih banyak dilibatkan setelah keputusan strategis ditetapkan. Mekanisme partisipasi lebih menekankan pada penyampaian kebijakan daripada perumusan bersama. Pola ini berimplikasi pada terbatasnya ruang deliberasi publik dalam pengembangan kawasan.

Status PSN juga membawa tekanan waktu dan target capaian investasi yang tinggi. Orientasi pada percepatan pembangunan dapat mengurangi fleksibilitas dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Proses negosiasi sosial sering kali berada dalam kerangka penyelesaian administratif. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kualitas partisipasi yang bersifat prosedural.

Secara struktural, konteks pengembangan Rempang *Eco-City* memperlihatkan adanya interaksi antara percepatan pembangunan dan mekanisme keterlibatan masyarakat. Struktur kewenangan, orientasi investasi, dan tekanan implementasi membentuk kerangka hubungan antara pemerintah dan warga. Dalam kerangka tersebut, ruang partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh desain kebijakan

dan pola komunikasi yang diterapkan. Kondisi ini menjadi latar penting untuk memahami dinamika partisipasi dalam kawasan transmigrasi.

2.2 Struktur Sosial Masyarakat Kawasan Transmigrasi

Kawasan transmigrasi di Rempang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang sosial yang beragam. Sebagian merupakan transmigran yang telah lama menetap dan membangun kehidupan sosial di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat masyarakat tempatan yang memiliki ikatan historis dengan kampung tua di sekitar pesisir. Keberagaman ini membentuk struktur sosial yang khas dalam kawasan pengembangan. Komposisi penduduk di Kelurahan Sembulang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

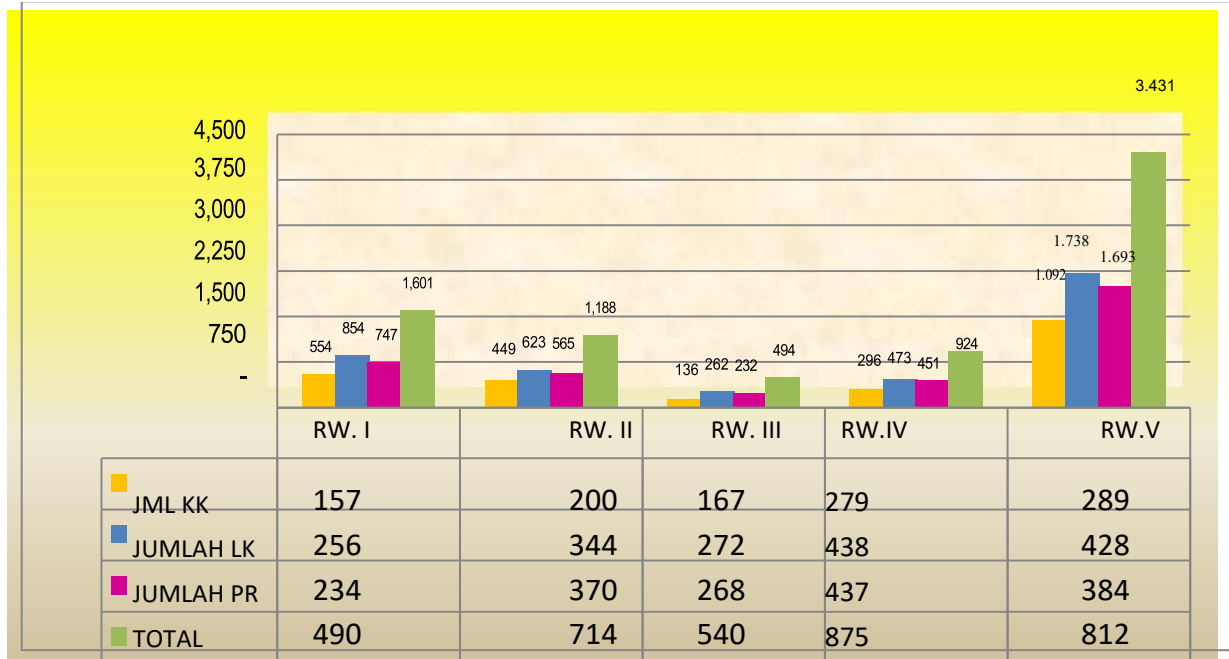
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Penduduk RT/RW Menurut Jenis Kelamin Kelurahan Sembulang Tahun 2024

N O	NAMA RT/RW	JABT (KETU A)	JML KK	JUMLAH		TOT AL	KET
				LK	PR		
1	TANGGUNGMA N	RW. I					
2	M.ARIS	RT. 01	91	147	130	277	
3	AZIZ SAPUTRA	RT. 02	66	109	104	213	
Jumlah			157	256	234	490	
1	HARDI.US	RW. II					
2	HAMZANHURI	RT. 01	98	204	185	389	
3	JISAMSIR	RT. 02	60	70	120	190	
4	JAMAL	RT. 03	42	70	65	135	
Jumlah			200	344	370	714	
1	SAFT'I	RW. III					

N O	NAMA RT/RW	JABT (KETU A)	JML KK	JUMLAH		TOT AL	KET
				LK	PR		
2	ALI	RT. 01	76	138	140	278	
3	AMRAN	RT. 02	91	134	128	262	
Jumlah			167	272	268	540	
1	KHABIB S.Pd.I	RW. IV					
2	THOMAS TAMPO	RT. 01	150	237	246	483	
3	SAHRIL IBRAHIM	RT. 02	129	201	191	392	
Jumlah			279	438	437	875	
1	ROMI SUSANDI	RW. V					
2	ARIANTONO	RT. 01	138	208	203	411	
3	SUMARNO	RT. 02	151	220	181	401	
Jumlah			289	428	384	812	
Total Keseluruhan			1.09 2	1.73 8	1.69 3	3.43 1	
Persentase			64,5 0	50,6 6	49,3 4	100, 00	

Sumber: Kelurahan Sembulang (2025)

Gambar 2. 2 Rekapitulasi Penduduk RT/RW Menurut Jenis Kelamin Kel. Sembulang Tahun 2024



Sumber: Kelurahan Sembulang (2025)

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Penduduk Menurut Mata Pencapaian Kelurahan Sembulang Tahun 2024

N O	RT / RW	MATA PENCAHARIAN							JML
		NELAYAN	PETANI	BURU H	W.SW ASTA	PNS& GURU	HON ORE R	LAIN NYA	
1	RW. I								
2	RT. 01	89	97	0	34	4	2	0	226
3	RT. 02	46	67	9	0	9	6	0	137
Jumlah ..		135	164	9	34	13	8	0	363
1	RW. II								
2	RT. 01	34	32	1	136	12	5	8	228
3	RT. 02	36	6	0	27	2	7	0	78
4	RT. 03	24	6	0	27	3	0	0	60
Jumlah ..		94	44	1	190	17	12	8	288
1	RW. III								
2	RT. 01	38	10	0	28	2	1	0	79
3	RT. 02	42	6	0	25	2	1	0	76
Jumlah ..		80	16	0	53	4	2	0	155
1	RW. IV								
2	RT. 01	0	135	0	55	2	1	0	193
3	RT. 02	10	100	3	140	0	6	0	259

NO		RT / RW	MATA PENCAHARIAN						JML
			NELAYAN	PETANI	BURUH	W.SWASTA	PNS & GURU	HONORER	
Jumlah ..		10	235	3	195	2	7	0	452
1	RW. V								
2	RT. 01	175	30	2	0	0	6	0	213
3	RT. 02	14	185	0	45	0	0	0	244
Jumlah ..		189	215	2	45	0	6	0	457
Total		373	510	6	483	23	27	8	1.715
Persentase		21,75	29,74	0,35	28,16	1,34	1,57	0,47	100,00

Sumber: Kelurahan Sembulang (2025)

Sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan tangkap dan aktivitas pesisir. Ketergantungan terhadap sumber daya laut menjadi ciri utama kehidupan ekonomi warga. Pola kerja nelayan yang bergantung pada musim dan kondisi alam membentuk ritme sosial tersendiri. Kondisi tersebut memengaruhi cara masyarakat merespons perubahan kebijakan pembangunan. Distribusi mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Sembulang dapat dilihat pada tabel berikut.

Selain nelayan, terdapat pula masyarakat yang bekerja di sektor informal dan usaha kecil. Aktivitas perdagangan skala rumah tangga berkembang sebagai

penunjang ekonomi keluarga. Sebagian warga juga bekerja di luar pulau sebagai buruh atau pekerja industri di Batam. Variasi mata pencaharian ini menunjukkan adanya diferensiasi ekonomi dalam komunitas transmigrasi.

Tingkat pendidikan masyarakat relatif beragam dengan dominasi lulusan sekolah dasar dan menengah pertama. Akses terhadap pendidikan tinggi masih terbatas bagi sebagian keluarga. Kondisi ini memengaruhi kapasitas warga dalam memahami informasi kebijakan yang bersifat teknis. Perbedaan tingkat pendidikan juga berdampak pada variasi bentuk keterlibatan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Sembulang dapat dilihat pada tabel berikut

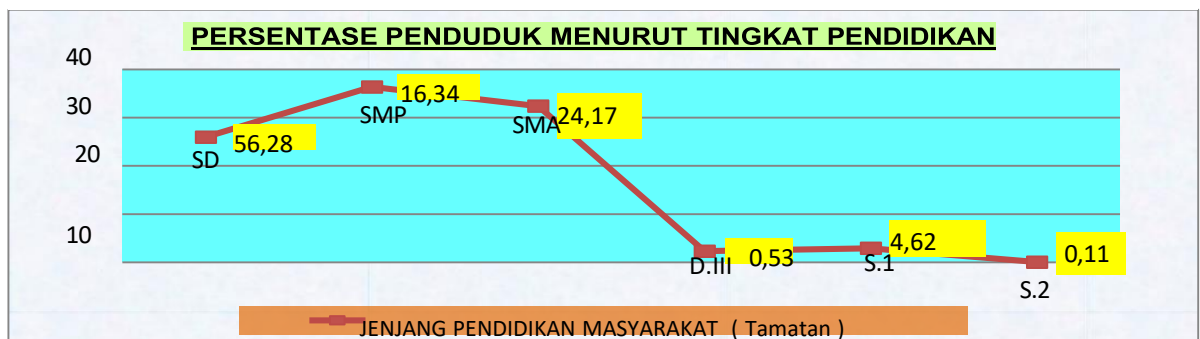
Tabel 2. 3 Demografi Penduduk Kelurahan Sembulang Berdasarkan Pendidikan

NO	RT / RW	JENJANG PENDIDIKAN MASYARAKAT (Tamatan)						JML
		SD	SMP	SMA	D.III	S.1	S.2	
1	RW. I							
2	RT. 01	32	19	78	0	7	0	136
3	RT. 02	117	9	35	3	7	0	171
Jumlah ..		149	28	113	3	14	0	307
4	RW. II							
5	RT. 01	215	34	41	5	18	2	315
6								
7	RT. 02	80	17	25	0	6	0	128
Jumlah ..		295	51	66	5	45	2	443
7	RW. III							
8	RT. 01	135	27	28	2	0	0	192
9	RT. 02	157	35	32	0	1	0	225
Jumlah ..		292	62	60	2	1	0	417
12	RW. IV							
13	RT. 01	128	32	25	0	2	0	187
14	RT. 02	98	38	42	0	6	0	184

No	RT / RW	JENJANG PENDIDIKAN MASYARAKAT (Tamatan)						JML
		SD	SMP	SMA	D.III	S.1	S.2	
	Jumlah ..	226	70	67	0	10	0	371
15	RW. V							
16	RT. 01	92	25	75	0	2	0	194
17	RT. 02	17	75	79	0	0	0	171
	Jumlah ..	109	100	154	0	18	0	365
	Total	1.071	311	460	10	88	2	1.903
	Persentase	56,28	16,34	24,17	0,53	4,62	0,11	100,00

Sumber: Kelurahan Sembulang (2025)

Gambar 2. 3 Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: Kelurahan Sembulang (2025)

Struktur usia masyarakat menunjukkan komposisi produktif yang cukup besar. Generasi muda mulai terpapar pada arus informasi digital dan perkembangan wilayah Batam. Sementara itu, generasi tua cenderung mempertahankan pola hidup berbasis tradisi pesisir. Perbedaan generasi ini membentuk perspektif yang tidak selalu sama terhadap rencana pembangunan. Distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel 2. 4 Demografi Penduduk Kelurahan Sembulang Berdasarkan Usia

N O	RT / RW	U S I A						JML
		0-4	5-6	7-15	16-21	22-49	> 50	
1	RW. I							
2	RT. 01	11	8	32	44	88	94	277
3	RT. 02	9	9	35	32	68	60	213
Jumlah		20	17	67	76	156	154	490
1	RW. II							
2	RT. 01	21	27	52	58	124	107	389
3	RT. 02	9	11	11	32	74	53	190
4	RT. 03	3	15	24	15	42	36	135
Jumlah		33	53	87	105	240	143	714
1	RW. III							
2	RT. 01	9	13	28	43	101	84	278
3	RT. 02	7	10	39	41	98	67	262
Jumlah		16	23	67	84	199	151	540
1	RW. IV							
2	RT. 01	19	29	47	58	170	160	483
3	RT. 02	17	29	53	75	119	99	392
Jumlah		36	58	100	133	289	259	875
1	RW. V							
2	RT. 01	12	19	48	54	142	136	411
3	RT. 02	17	21	43	94	112	114	401
Jumlah		29	40	91	148	254	250	812
Total		134	191	412	546	1.138	957	3.431
Persentase		3,91	5,57	12,01	15,91	33,17	27,89	100,0

Gambar 2. 4 Demografi Penduduk Kelurahan Sembulang Berdasarkan Usia



Sumber: Kelurahan Sembulang (2025)

Dalam struktur sosial lokal, tokoh masyarakat dan pemuka adat memiliki peran penting. Mereka sering menjadi perantara antara pemerintah dan warga. Posisi ini menjadikan komunikasi kebijakan banyak disalurkan melalui figur tertentu. Mekanisme tersebut membentuk pola representasi dalam penyampaian aspirasi masyarakat.

Ikatan kekerabatan di kawasan transmigrasi relatif kuat dan berbasis komunitas. Hubungan sosial dibangun melalui aktivitas keagamaan, gotong royong, dan kegiatan adat. Solidaritas internal menjadi modal sosial dalam menghadapi perubahan lingkungan. Modal sosial ini turut memengaruhi dinamika komunikasi dalam konteks pembangunan.

Masyarakat kampung tua memiliki identitas historis yang melekat pada ruang pesisir. Keberadaan makam leluhur, lahan adat, dan lokasi penangkapan ikan menjadi bagian dari identitas kolektif. Transformasi ruang akibat pengembangan

kawasan berpotensi memengaruhi keterikatan tersebut. Identitas lokal menjadi faktor penting dalam membentuk sikap terhadap relokasi.

Perubahan wacana pembangunan membawa pergeseran persepsi mengenai masa depan wilayah. Sebagian masyarakat melihat peluang ekonomi dari hadirnya investasi. Namun, sebagian lainnya memandang adanya risiko terhadap keberlanjutan mata pencaharian tradisional. Perbedaan persepsi ini menciptakan dinamika internal dalam komunitas.

Struktur gender dalam masyarakat menunjukkan pembagian peran yang relatif tradisional. Laki-laki umumnya berperan sebagai pencari nafkah utama di sektor perikanan. Perempuan banyak terlibat dalam pengolahan hasil tangkap dan aktivitas domestik. Pembagian peran ini memengaruhi tingkat keterlibatan masing-masing kelompok dalam forum formal.

Interaksi antara masyarakat transmigran dan masyarakat tempatan berlangsung dalam pola sosial yang relatif harmonis. Kegiatan bersama dalam bidang ekonomi dan keagamaan memperkuat integrasi sosial. Namun, perubahan kebijakan ruang dapat memunculkan potensi ketegangan baru. Dinamika tersebut menjadi bagian dari struktur sosial kawasan.

Secara umum, struktur sosial masyarakat kawasan transmigrasi menunjukkan karakter komunitas pesisir dengan ikatan kekerabatan yang kuat. Variasi pendidikan, pekerjaan, usia, dan identitas lokal membentuk kompleksitas internal masyarakat. Kondisi sosial tersebut menjadi latar penting dalam memahami

respons warga terhadap kebijakan pembangunan. Dengan demikian, struktur sosial kawasan menjadi konteks utama dalam melihat dinamika partisipasi masyarakat.

2.3 Struktur Kelembagaan dan Relasi Aktor

Pengembangan Rempang *Eco-City* melibatkan berbagai aktor kelembagaan di tingkat pusat dan daerah. Keterlibatan tersebut mencerminkan karakter proyek yang berskala strategis nasional. Koordinasi lintas institusi menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan. Struktur kelembagaan ini membentuk pola hubungan yang memengaruhi dinamika pembangunan di kawasan transmigrasi. Struktur aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Daftar Nama Pegawai Kelurahan Sembulang Tahun 2024

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	PENDIDIKAN	ESE LON
1.	Zainal, S.IP / 19800124 201001 1 002	Penata / III.b	Lurah	S.I	IV.b
2.	Khalid, S.T/ 19830211 200212 1 005	Penata Muda / III.b	Sekur	S.I	IV.b
3.	Dian Nurhuda, S.IP/ 19640512 198503 2 002	Penata / III.b	Kasi.Pem & Yanmum	S.I	IV.b
4.	Bahtera Ginting, S.T/ 19731019 200801 1 009	Penata Muda Tk.I / III d	Kasi Trantib	S.I	IV.b
5.	Tuty Kusumaningrum, S.Ag/ 19721027 201405 2 002	Penata Muda Tk.I / III.c	Kasi PPKM	S.I	IV/ b
6.	Zahratul Aini, S.I.P/ 19841206 201001 2 004	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	S.I	Staf

Tenaga Honor :

1.	Adi, S.Sos	-	Tenaga. Honor	S.I	-
2.	Sutrisno, S.Pd	-	Tenaga. Honor	S.I	-

Sumber: Kelurahan Sembulang (2025)

Pada tingkat daerah, kewenangan pengelolaan kawasan berada pada BP Batam yang memiliki mandat khusus dalam pengembangan wilayah. Lembaga ini bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan lahan, dan fasilitasi investasi. Posisi tersebut menjadikan BP Batam sebagai aktor sentral dalam pengambilan keputusan strategis. Peran dominan ini turut membentuk arus komunikasi kebijakan kepada masyarakat.

Selain BP Batam, Pemerintah Kota Batam memiliki fungsi administratif dan pelayanan publik. Pemerintah daerah berperan dalam penyediaan layanan dasar dan koordinasi sosial kemasyarakatan. Interaksi antara pemerintah daerah dan BP Batam menunjukkan adanya pembagian kewenangan dalam pengelolaan wilayah. Struktur ganda ini memengaruhi mekanisme koordinasi kebijakan di tingkat lokal.

Tabel 2. 6 Dualisme Kelembagaan Pembangunan Kota Batam

Kelembagaan	Fungsi Utama	Kewenangan Perizinan	Pengembangan Ekonomi
BP Batam	Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di Kota Batam, termasuk dalam kegiatan perencanaan, pengawasan, serta pelaksanaan berbagai proyek berskala besar.	BP Batam memiliki kewenangan dalam penerbitan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan arus lalu lintas barang, termasuk pengelolaan kawasan industri serta fasilitas pelabuhan.	Berorientasi pada upaya menarik investasi, mempercepat pengembagnagn sektor industri, serta meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Kewenangan tersebut bersumber dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perdagangan, terutama dalam penerbitan terkait arus keluar masuk barang

Kelembagaan	Fungsi Utama	Kewenangan Perizinan	Pengembangan Ekonomi
Pemko Batam	Berperan dalam penyusunan rencana tata ruang, pengelolaan pembangunan infrastruktur publik, serta pengaturan kehidupan sosial masyarakat.	Bertanggung jawab dalam pengendalian pembangunan yang meliputi pengaturan zonasi, pemanfaatan lahan, serta penyediaan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan ruang terbuka.	Memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengelolaan lingkungan hidup, serta pengelolaan pendapatan daerah guna mendukung keberlanjutan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

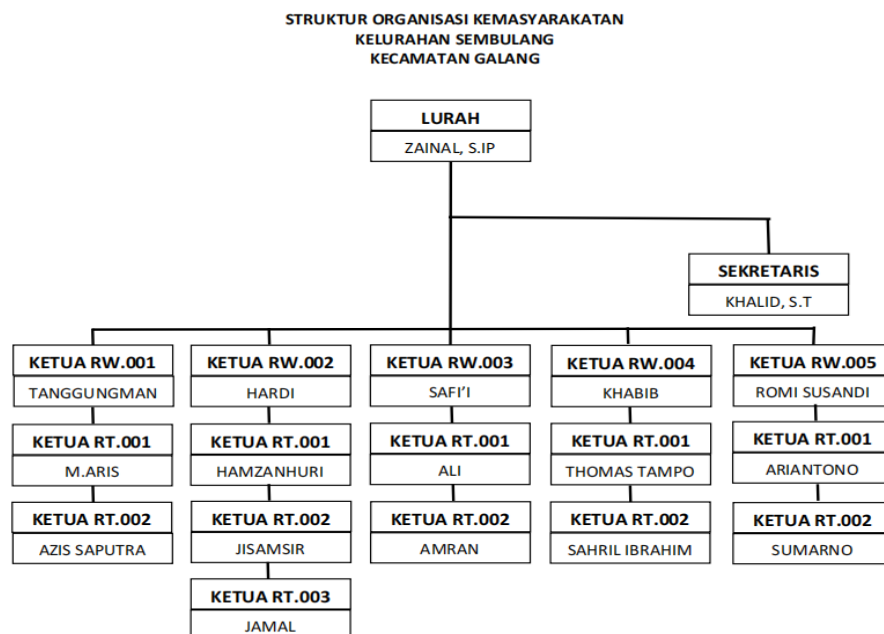
Kementerian terkait di tingkat pusat juga terlibat dalam penetapan dan pengawasan proyek. Status Proyek Strategis Nasional membawa konsekuensi pada pengawasan langsung oleh pemerintah pusat. Kebijakan yang diambil di tingkat nasional menjadi acuan utama dalam pelaksanaan di daerah. Hubungan vertikal ini memperlihatkan adanya rantai komando dalam implementasi pembangunan.

Dalam pelaksanaan teknis, terdapat satuan kerja atau tim khusus yang menangani pengembangan kawasan transmigrasi. Tim ini bertugas mengkoordinasikan tahapan relokasi, penyediaan hunian, dan fasilitas pendukung. Keberadaan satuan kerja menjadi penghubung antara kebijakan strategis dan pelaksanaan di lapangan. Posisi tersebut berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terdampak.

Investor sebagai pihak swasta juga menjadi aktor penting dalam struktur kelembagaan. Keterlibatan investor berkaitan dengan rencana pembangunan industri dan infrastruktur kawasan. Orientasi investasi membawa pertimbangan efisiensi dan kepastian hukum dalam pengelolaan lahan. Kehadiran aktor swasta ini menambah kompleksitas relasi dalam pengembangan wilayah.

Pada tingkat lokal, tokoh masyarakat dan pemuka adat memiliki posisi representatif. Mereka sering menjadi perantara komunikasi antara pemerintah dan warga. Peran representatif tersebut membentuk pola penyampaian aspirasi yang bersifat kolektif. Mekanisme ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sering kali berlangsung melalui figur tertentu. Struktur organisasi masyarakat di tingkat lokal terdiri dari RT dan RW sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Kemasyarakatan (RT/RW)



Sumber: Kelurahan Sembulang (2025)

Kelompok nelayan dan komunitas warga juga membentuk organisasi informal maupun semi-formal. Organisasi tersebut menjadi wadah diskusi internal mengenai kebijakan pembangunan. Melalui forum komunitas, masyarakat membahas dampak relokasi dan perubahan ruang hidup. Struktur komunitas ini menjadi bagian dari jaringan sosial dalam kawasan transmigrasi.

Relasi antar aktor dalam pengembangan kawasan menunjukkan adanya distribusi kewenangan yang tidak sepenuhnya seimbang. Aktor pemerintah memiliki posisi dominan dalam perumusan kebijakan. Masyarakat lebih banyak terlibat pada tahap sosialisasi dan penerimaan informasi. Pola hubungan ini membentuk karakter komunikasi kebijakan yang bersifat vertikal.

Koordinasi antarinstansi dilakukan melalui rapat, sosialisasi, dan forum resmi lainnya. Mekanisme tersebut menjadi sarana penyampaian rencana pembangunan kepada masyarakat. Namun, forum formal sering kali memiliki struktur agenda yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini memengaruhi ruang diskusi yang tersedia bagi warga.

Dalam konteks kelembagaan, keberadaan regulasi menjadi dasar pelaksanaan proyek. Aturan hukum mengatur status lahan, tata ruang, dan mekanisme relokasi. Kepastian regulasi menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan kawasan. Struktur regulatif ini membingkai interaksi antara pemerintah, investor, dan masyarakat.

Secara umum, struktur kelembagaan pengembangan Rempang *Eco-City* memperlihatkan keterlibatan multiaktor dengan kewenangan yang berlapis.

Dominasi aktor pemerintah dan dukungan kebijakan pusat membentuk arah pembangunan kawasan. Masyarakat berada dalam posisi sebagai pihak yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut. Kondisi kelembagaan ini menjadi konteks penting dalam memahami pola partisipasi masyarakat di kawasan transmigrasi.

2.4 Karakteristik Kawasan Transmigrasi Tanjung Banun

Kawasan Transmigrasi Tanjung Banun merupakan lokasi relokasi yang disiapkan dalam rangka pengembangan Rempang *Eco-City*. Kawasan ini dirancang sebagai permukiman baru bagi masyarakat yang terdampak transformasi ruang. Penataan wilayah dilakukan dengan pendekatan kawasan terpadu yang mencakup hunian dan fasilitas pendukung. Keberadaan kawasan ini menjadi bagian dari strategi penataan sosial dalam proyek pembangunan.

Secara spasial, kawasan transmigrasi dibagi ke dalam beberapa satuan permukiman (SP). Setiap SP dirancang dengan pola blok hunian yang relatif seragam. Tata letak permukiman disesuaikan dengan rencana penyediaan infrastruktur dasar. Struktur spasial ini membentuk pola interaksi sosial baru bagi masyarakat yang menempatnya.

Hunian yang disediakan berupa rumah dengan tipe dan ukuran yang telah ditentukan pemerintah. Fasilitas dasar seperti jalan lingkungan, listrik, dan air bersih disiapkan sebagai penunjang permukiman. Selain itu, terdapat fasilitas umum seperti tempat ibadah dan ruang terbuka. Penyediaan sarana tersebut dimaksudkan untuk mendukung keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.

Fasilitas peribadatan di Kawasan Transmigrasi Tanjung Banun tersebar pada beberapa satuan permukiman (SP). Sebaran fasilitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Fasilitas Peribadatan Kawasan Transmigrasi Tanjung Banun

Satuan Permukiman	Masjid	Mushola	Klenteng
Rempang <i>Eco-City</i> (SP-Baru)	-	1	-
Tanjung Banun (SP-Tempatan)	1	-	-
Dapur Enam (SP-Tempatan)	1	-	1

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Lokasi kawasan transmigrasi relatif terpisah dari sebagian wilayah tangkap nelayan sebelumnya. Perubahan jarak antara permukiman dan laut memengaruhi pola aktivitas harian warga. Sebagian masyarakat perlu menyesuaikan kembali akses menuju sumber mata pencaharian. Kondisi ini membentuk dinamika adaptasi dalam kehidupan ekonomi keluarga.

Kemudian, dari sisi sosial, perpindahan ke kawasan baru menciptakan proses penataan ulang relasi antar warga. Masyarakat yang sebelumnya tinggal dalam struktur kampung tua kini berada dalam pola permukiman terorganisasi.

Interaksi sosial tidak lagi sepenuhnya berbasis kedekatan kekerabatan lama. Proses adaptasi ini menjadi bagian dari dinamika kehidupan di kawasan transmigrasi.

Karakter kawasan transmigrasi juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi ruang. Lingkungan yang sebelumnya bercorak pesisir berubah menjadi kawasan permukiman yang lebih terstruktur. Transformasi tersebut membawa perubahan pada tata guna lahan dan pola aktivitas ekonomi. Pergeseran ruang ini menjadi latar penting dalam memahami perubahan sosial yang terjadi.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah melakukan pendataan dan penataan administrasi warga yang direlokasi. Proses ini mencakup verifikasi kepemilikan rumah dan pencatatan keluarga penerima hunian. Administrasi kawasan menjadi bagian dari sistem pengelolaan permukiman baru. Mekanisme tersebut membentuk struktur formal dalam kehidupan masyarakat.

Kehidupan di kawasan transmigrasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi. Keberadaan sarana pendidikan dan kesehatan menjadi faktor pendukung stabilitas sosial. Akses terhadap pasar dan jaringan transportasi memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi. Kondisi fasilitas ini turut membentuk pengalaman masyarakat dalam menempati kawasan baru. Salah satu fasilitas sosial penting di kawasan transmigrasi adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Sebaran fasilitas kesehatan di Kawasan Transmigrasi Tanjung Banun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8 Fasilitas Kesehatan Kawasan Transmigrasi Tanjung Banun

Satuan Permukiman	Puskesmas Pembantu	PosKesDes	Posyandu
Rempang <i>Eco-City</i> (SP-Baru)	1	-	-
Tanjung Banun (SP-Tempatan)	-	1	1
Dapur Enam (SP-Tempatan)	-	1	1

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Selain fasilitas kesehatan, ketersediaan fasilitas pendidikan juga menjadi aspek penting dalam mendukung kehidupan masyarakat di kawasan transmigrasi. Sebaran fasilitas pendidikan di Kawasan Transmigrasi Tanjung Banun berikut:

Tabel 2. 9 Fasilitas Pendidikan Kawasan Transmigrasi Tanjung Banun

Jenis Fasilitas	Jumlah	Keterangan
TK	1	Berada di SP-Tempatan Dapur Enam
SD	-	Diakses di luar Kawasan transmigrasi
SMP	-	Diakses di luar Kawasan transmigrasi

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Secara umum, Kawasan Transmigrasi Tanjung Banun memiliki karakter sebagai permukiman terencana dengan struktur spasial dan administratif yang terorganisasi. Perubahan ruang hidup membawa penyesuaian dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Interaksi antarwarga berlangsung dalam konteks lingkungan yang berbeda dari sebelumnya. Karakteristik kawasan ini menjadi konteks penting dalam memahami dinamika kehidupan masyarakat pasca relokasi.